

KONSEP PELATIHAN *LEGAL DRAFTING*

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Guru Besar HTN dan *Senior Partner* INTEGRITY Law Firm

Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

18 April 2022

PROFIL INTEGRITY *LAW FIRM*

INTEGRITY



“Integrity is doing
the right thing,
even when no one
is watching.”

C. S. Lewis



TENTANG INTEGRITY LAW FIRM

Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm

sesuai dengan namanya, dimaksudkan untuk memberikan layanan profesional dengan kapasitas terbaik dan integritas tak terbeli, menolak tegas praktik mafia hukum. Didirikan oleh **Denny Indrayana**, Guru Besar Hukum Tata Negara, yang telah berpengalaman sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia untuk bidang hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Serta, menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2011 sampai 2014.

Menyediakan berbagai layanan hukum, di antaranya:

- *Legal Advocacy;*
- *Legal Research;*
- *Legal Audit;*
- *Legal Training;*
- *Good Governance & Good Corporate Governance;*
- *Legal Consultancy.*

1. *Business Competition Disputes*
2. *Corporate Law*
3. *Investment Law*
4. *Capital Market Law*
5. *Business Licensing*
6. *Tax Law*
7. *Banking Law*
8. *Asset Recovery*
9. *Bankruptcy Law*
10. *Labour Law*
11. *Immigration Law*
12. *Land Disputes*
13. *Civil Law*
14. *Criminal Law*
15. *General Election Dispute*
16. *State Administrative Claims*
17. *Constitutional Law Disputes*
18. *Constitutional review at the Constitutional Court*
19. *Judicial review at the Supreme Court*
20. *Good Governance*
21. *Good Corporate Governance*
22. *Drafting of Public and Corporate Regulations*
23. *Natural Resources Disputes*
24. *Intellectual Property Rights*
25. *Environmental Law*
26. *Family Law*

AREAS OF PRACTICE

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Ahli Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Ketua STH - Jember

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Visi Integritas

KEYNOTE SPEAKER
Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc.
Wakil Ketua KPK Periode 2011-2015

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Diansyah, S.H.
Managing Partner Visi Integritas Law Office

SESI VI
Irene Putri, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum JAMDATUN KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa, Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Doorprize Buku dari Pemateri

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tindak Pidana Korupsi terkait Korporasi;
2. Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang terkait korporasi.

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencucian Uang oleh Korporasi;
2. Memahami Perjanjian dan Perma Tindak Pidana Korporasi;
3. Memahami Perpres Beneficial Ownership.

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi;
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgement Rule.

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi;
2. Mencapai Penyiapan oleh Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001);
3. Memperkuat Pengawasan Internal Korporasi Melalui Penerapan WBS ISO 37002 (Whistleblowing Management Systems).

SESI V

1. Pengendalian gratifikasi: larangan dan batasan pemberian kepada public official;
2. Strategi menghadapi public official yang meminta uang lebih;
3. Studi kasus.

SESI VI

1. Tipologi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus.

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi.
Rp. 500.000,- Per Gen/Materi (Minimal mengikuti 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
1815906299
KCS PD INDAH a/n INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 26 September 2021 melalui link bit.ly/INTEGRITYTRAINING

NARAHUBUNG Abdullatief Zainal : 0821 2555 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #1
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M, Ph.D
Guru Besar HTH & Senior Partner INTEGRITY

Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bus
Dosen Pendidikan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Faisal H. Baar, S.E., M.A
Ekonom Senior

MODERATOR
Abdulatief Zainal, S.H
Lawyer INTEGRITY

Kamis, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD1

FREE

Narahubung: Dabala Ruedhina (0812-9930-8378) | Kunjungi kami di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGensi AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER
Moh. Mahfud MD
Menkopolkum RI

NARASUMBER
Yudi Latief
Ketua PGK Indonesia

Arsul Sani
Wakil Ketua MPR RI

MODERATOR
M. Rizki Barokah
Senior Lawyer INTEGRITY Law Firm

Bivriti Susanti
Akademisi STH - Jember

Denny Indrayana
Guru Besar HTH
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/INTEGRITYCD2
Tersedia e-certificate

Kamis, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Narahubung: Fabry Sitouss 08126667127 | Kunjungi kami di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER
Denny Indrayana
Guru Besar HTH
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

NARASUMBER
Moh. Qodari
Pengagregat Komunitas Job Pro
Direktur Eksekutif Indo Barometer

Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR
Widha Zara Yekawati
Lawyer INTEGRITY Law Firm

Titi Angraini
Devian Perencana, Peltakom

Tim Lindsey
Professor Macquarie Law School,
Australia

Jumat, 17 September 2021
Pukul 15.30 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/INTEGRITYCD3

Narahubung: Fabry Sitouss 08126667127 | Kunjungi kami di www.integritylaw.id

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

PROFIL Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.



Pendiri dan *Senior Partner* INTEGRITY Law Firm

Bertanggungjawab penuh terhadap jalannya perusahaan, serta memberi konsultasi dan menangani perkara litigasi-non litigasi, dari swasta, korporasi maupun perorangan.

Guru Besar Hukum Tata Negara, yang telah berpengalaman sebagai penasihat khusus Presiden Republik Indonesia untuk bidang hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Kemudian Denny Indrayana juga dipercaya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Sejak tahun 2015, Denny Indrayana juga menjadi Profesor Tamu di Melbourne University Law School, yang merupakan fakultas hukum terbaik di Australia.



TENAGA PROFESIONAL INTEGRITY LAW FIRM



Dra. Wigati Partosedono, S.H., LL.M.

Memulai karirnya di sebuah perusahaan minyak. Dia bertanggung jawab untuk menangani produk mentah dan produk LPG, serta persiapan berbagai kontrak.

Sebelum itu, dia bekerja untuk perusahaan ekspor dan impor. Sejak 1994, ia telah bekerja di beberapa firma hukum sebagai advokat dan dipercaya untuk menangani masalah perusahaan.



Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.

Advokat, kurator, dan pengurus yang berwenang menangani perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berkarir di pemerintahan sejak tahun 2009 sebagai asisten Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN; Asisten Satgas Pemberantasan Mafia Hukum; Staf Ahli di Komisi III DPR RI.



Harimuddin, S.H.

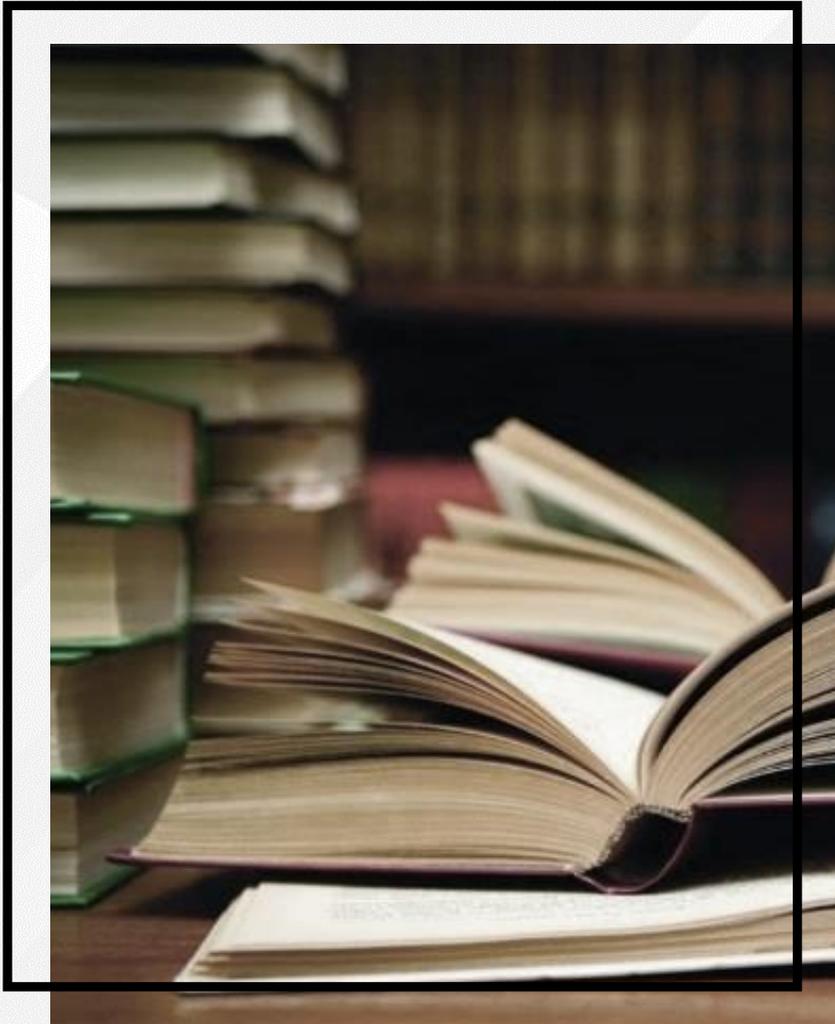
Pengacara Praktik/Advokat sejak tahun 2000. Mulai tahun 2008 berkarir di pemerintahan sebagai asisten Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN; Kepala Divisi Pengaduan Masyarakat di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum; Asisten di Satgas/Badan Pengelola REDD+

***Training Legal Drafting: MENGAPA
PERLU?***



- Dalam rangka mewujudkan negara *welfare state*, pemerintah melakukan berbagai kegiatan pembangunan, termasuk dalam hal hukum dan perundang-undangan. Untuk meminimalisir resiko dan optimalisasi hasil, maka penting untuk membuat perencanaan pembangunan yang matang.
- Perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan basis regulasi dan dilaksanakan berdasarkan keputusan yang disusun secara komprehensif. Untuk itu dibutuhkan SDM yang memahami aspek teknis, kaidah umum, dan strategi penyusunan regulasi dan keputusan yang baik agar menghasilkan produk hukum yang efektif.
- Penting juga untuk memasukkan elemen progresivisme hukum dalam penyusunan regulasi dan keputusan dengan menyerap sebaik-baiknya aspek yuridis-ekonomis-sosiologis.
- **Pelatihan dilaksanakan guna menjawab tantangan dan kebutuhan di atas. Tidak hanya membekali kemampuan teknis *legal drafting*, namun lebih jauh mampu melakukan analisis dampak dari suatu peraturan dan keputusan.**

METODE PEMBELAJARAN



1. Diskusi Kasus;

Materi yang akan diberikan tidak hanya terkait konsep tetapi juga persoalan dan kasus konkrit dalam praktik, yang didiskusikan secara interaktif dan menarik.

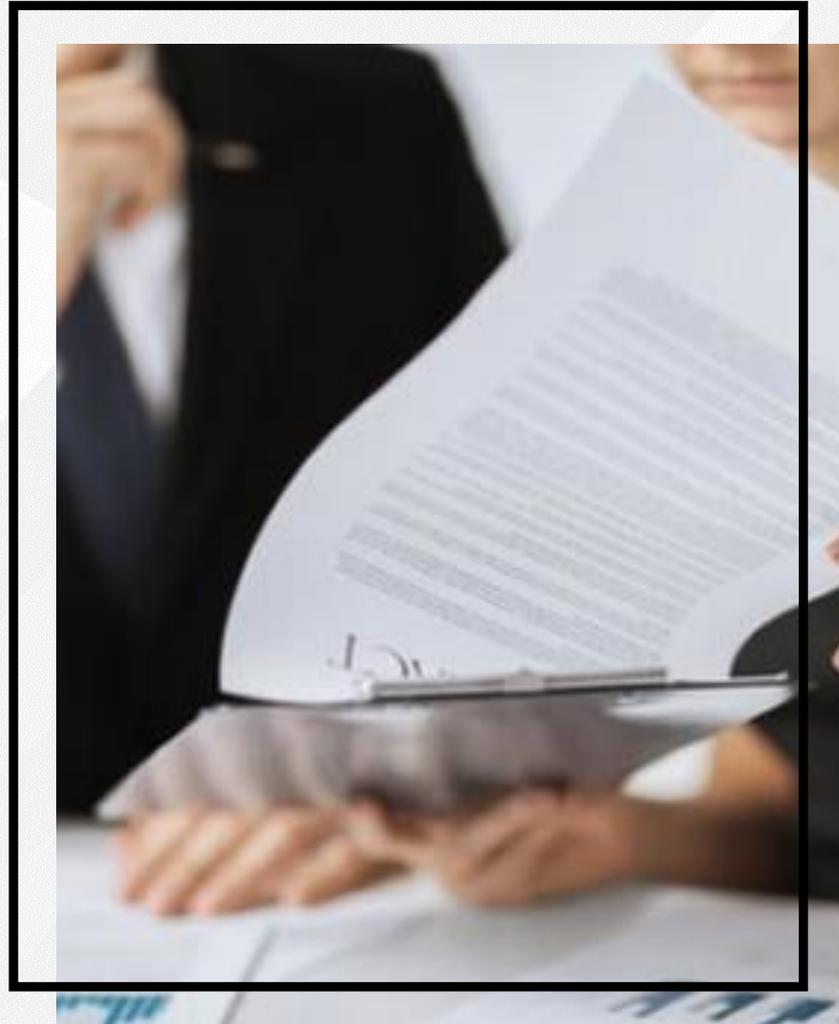
2. Pemateri Terbaik;

Tim Pengajar adalah pengajar terpilih pada level nasional yang mempunyai *background* keilmuan dan berpengalaman langsung dalam bidang *legal drafting*.

3. Kelas Kecil;

Materi disampaikan dalam lingkup kelas kecil. Maksimal dengan peserta 30 (tiga puluh) orang, dengan tujuan agar diskusi dapat berjalan lebih intensif dan utuh.

PESERTA



Peserta Legal Drafting

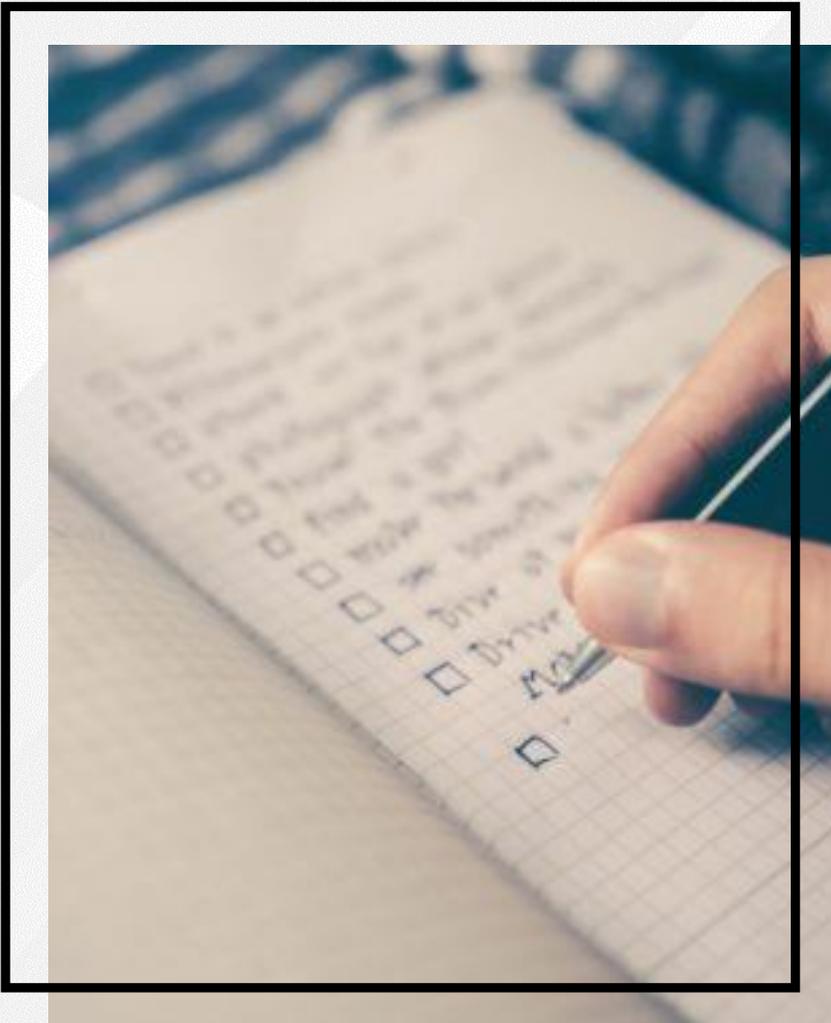
Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang terkait langsung dalam implementasi dan produksi dokumen *legal*.

WAKTU DAN TEMPAT

Waktu dan Tempat

Pelatihan *Legal Drafting* diselenggarakan pada waktu dan tempat yang disepakati dengan cara:

1. Daring (*on-line*);
2. Luring (*off-line*) / Hotel, penginapan, dsb.
3. Kombinasi (*online-offline*).



MATERI



Materi ini menjelaskan konsep dasar peraturan perundang-undangan serta masalah empiris (studi kasus) yang sering terjadi dalam proses penyusunan regulasi. Dengan mempelajari materi ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman secara umum tentang hal-hal dasar dalam menyusun suatu aturan ataupun kebijakan.

1. Konsep Dasar, Prinsip dan Asas Peraturan Perundang-undangan

2.

Jenis, Hierarki, Materi Peraturan Perundang-undangan

Materi ini menjelaskan mengenai makna, stratifikasi dan ruang lingkup materi peraturan perundang-undangan, mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, dalam materi ini akan disampaikan pula mengenai sengketa peraturan perundang-undangan (*judicial review*) serta sengketa tindakan dan keputusan pejabat tata usaha negara.

Materi ini menjelaskan teknik menyusun suatu peraturan perundang-undangan agar peserta memahami penggunaan frasa, kata, angka, huruf, tanda baca, hingga kalimat yang tepat pada saat menyusun peraturan perundang-undangan.

3. Ragam Bahasa, Teknik dan Analisis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

4. Teknik Penyusunan Naskah Akademik

Materi ini menguraikan tentang cara menyusun naskah akademik sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undangan nomor UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai salah satu syarat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maka materi ini disampaikan agar peserta paham dan mampu menyusun naskah akademik sebagai latar belakang tersusunnya suatu peraturan perundang-undangan.

Materi ini menjelaskan bagaimana koordinasi teknis antar lembaga dalam proses penyusunan peraturan di lingkup kementerian, harmonisasi substansi peraturan perundang-undangan yang dibentuk di lingkup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, untuk menghindari terciptanya regulasi yang tumpang tindih dan bertentangan.

5. Teknik dan Prosedur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

6. Studi Kasus Uji Peraturan Perundang- undangan

Materi ini akan menjelaskan studi kasus atas sebuah regulasi (baik undang-undang maupun di bawahnya) yang diajukan uji materiil/formil ke lembaga peradilan tertentu akibat kurang sempurnaan dalam proses penyusunan. Dengan mempelajari kasus-kasus yang ada, peserta diharapkan dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat membuat sebuah regulasi dibatalkan oleh lembaga yang berwenang.

7. Studi Kasus Sengketa Tata Usaha Negara

Materi ini akan menjelaskan mengenai sengketa Tata Usaha Negara yang biasanya terjadi karena minimnya pengetahuan pejabat pemerintahan baik dalam pembuatan keputusan maupun tindakan faktual, sehingga di dalam materi juga akan melatih bagaimana teknik dalam pembuatan keputusan/ketetapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, agar nantinya ketika peserta ingin membuat suatu keputusan/ketetapan, maka keputusan/ketetapan yang dikeluarkan tersebut akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan.

8. Praktek Analisis Regulasi yang Sedang Disusun oleh BAPPENAS

Materi ini ialah terkait praktek analisis regulasi yang sudah ditetapkan atau sedang disusun oleh BAPPENAS, praktik ini dilakukan agar regulasi yang saat ini disusun oleh BAPPENAS diberi review dan dijelaskan oleh pemateri agar sesuai dengan syarat penyusunan peraturan perundang-undangan.

9. Evaluasi Hasil Praktek

Dalam sesi ini akan dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja kelompok, sehingga diharapkan ada masukan yang bermanfaat bagi peserta dalam menyusun regulasi.

10. Menghadirkan Hukum Progresif yang Berkeadilan

Materi ini akan membahas arti pentingnya pemahaman hukum progresif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Penting dilakukan karena dalam setiap rancangan pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah menyerap kebutuhan masyarakat saat ini maupun ke depan, dan hukum progresif adalah pandangan hukum yang melihat kepada sisi tersebut.

11.

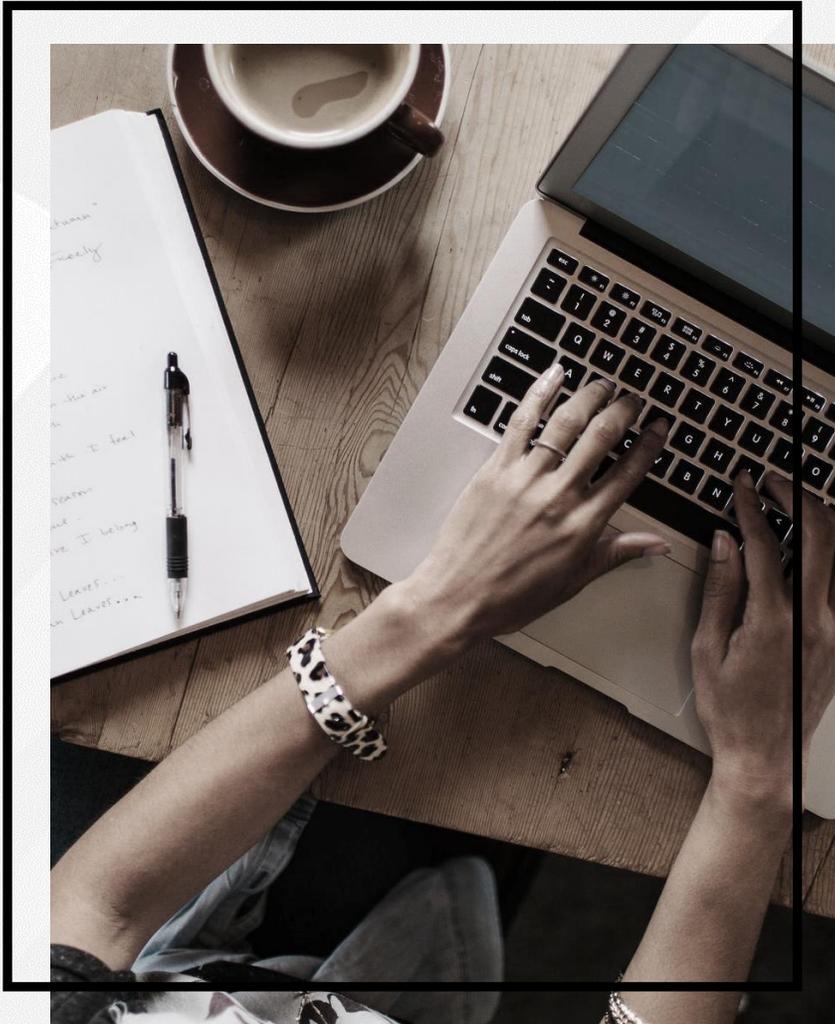
Memahami dan Menerapkan *Regulatory Impact Assessment* dan *Cost and Benefit Analysis*

Materi ini akan mengupas tuntas terkait Regulatory Impact Assessment dan cost and benefit analysis atas suatu rancangan peraturan terutama yang terkait erat dengan lingkup kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

12. *Comprehensive Review*

Dalam sesi ini akan dilakukan review menyeluruh sebagai bentuk evaluasi akumulatif berdasarkan hasil praktek dan evaluasi peserta, hal ini dilakukan untuk memastikan peserta paham secara penuh materi-materi yang telah disampaikan.

PENYELENGGARA



Penyelenggara

1. **INTEGRITY *Law Firm.***
2. **Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.**

TIM PENGAJAR DAN FASILITATOR

- Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Senior Partner pada INTEGRITY (Indrayana Center for Government, Constitution, and Society). Denny telah menjadi pengacara sejak Februari 2000, atau telah berpengalaman hampir dua dekade. Dia pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM (2011-2014) dan Staf Khusus Presiden bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN (2008-2011). Denny juga adalah Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada sejak 2010, sebelum mengundurkan diri pada Agustus 2018.

Denny pernah menjadi Visiting Professor di Melbourne Law School dan Faculty of Arts, University of Melbourne, Australia (2016—2019). Denny banyak berpengalaman dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi baik sebagai kuasa hukum maupun ahli. Sejauh ini, Denny telah menerbitkan 10 buah buku di bidang Hukum Tata Negara maupun persoalan hukum kontemporer. Pada awal tahun 2019, Denny meluncurkan buku berjudul "Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi".



- Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si.

ASN pada Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kiprahnya dalam bidang *legal drafting* diantaranya adalah sebagai penyusun modul dan pengajar pada pelatihan *legal drafting* di LAN, serta telah mengajar dalam berbagai pelatihan *legal drafting* baik untuk level nasional maupun daerah. Selain itu, terlibat juga dalam penyusunan berbagai regulasi di tingkat pemerintahan, serta mempunyai pengalaman memberikan berbagai advokasi terkait teknik penyusunan regulasi.

Berbagai jabatan yang pernah diemban, sebagai Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN, Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara LAN serta Kepala Bagian Hukum dan Organisasi LAN, memberikan banyak pengalaman di bidang riset hukum administrasi negara maupun hukum tata negara serta teknis penyusunan produk hukum di lingkungan birokrasi pemerintahan.



- Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A., Ph.D

Dr. Herlambang merupakan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sebagai lulusan S2 Universitas Mahidol Thailand dan S3 Universitas Leiden Belanda, ia sudah sangat banyak melakukan penelitian dalam bidang HTN/HAN, HAM, hukum dan masyarakat serta kebebasan pers. Salah satu penelitiannya antara lain “*Indonesia’s Constitutional Responses to Plurality*” dan “*Pluralist Constitution in Southeast Asia*”, “*Freedom of Expression, Law and Politics in Indonesia*” dan masih banyak lagi.

Di luar profesi sebagai dosen, Dr. Herlambang terlibat aktif dalam berbagai asosiasi akademik diantaranya sebagai pendiri *Southeast Asian Human Rights Studie Network* (SEAHRN), juga menjadi ketua pada beberapa asosiasi akademisi seperti Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM, 2014-2017), Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI, 2013-2014), dan Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia (HRLS) FH UNAIR (2015-sekarang).



Dr. Roberia, S.H., M.H.

Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bertugas memimpin penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik, pertahanan dan keamanan, hukum, hak asasi manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, bertanggungjawab atas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik, pertahanan dan keamanan, hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat; Pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan supervisi harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik, pertahanan dan keamanan, hukum, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I.



- Zamrony, S.H., M.Kn, CRA



Partner di IINTEGRITY *Law Firm*. Di bidang hukum dan birokrasi, mengemban amanah sebagai Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN (2009-2011), Asisten Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Bidang Penelitian dan Pengkajian (2009-2011), dan Asisten Wakil Menteri Hukum dan HAM (2011-2014).

Banyak terlibat dalam penelitian, penyusunan kebijakan dan perancangan naskah akademik dan peraturan perundang-undangan selama bertugas di Istana Negara/Sekretariat Negara, Kemenkumham serta lembaga lainnya hingga saat ini. Anggota Pokja Bantuan Hukum untuk Orang Miskin (2013). Selain itu, pada tahun 2008-2009 didapuk menjadi Direktur *Indonesian Court Monitoring*, dan Dewan Redaktur Tabloid Notaris Indonesia (2013). Menulis buku “Panduan KKN Tematik Pemantauan Peradilan” bersama kolega PuKAT Korupsi FH UGM. Bersama penulis lainnya, juga berkontribusi dalam penulisan buku panduan penyusunan peraturan desa (*World Bank*).

- **Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.**



Senior Lawyer di INTEGRITY dengan spesialisasi pada bidang hukum administrasi negara dan hukum konstitusi. Memulai karir sebagai Peneliti Muda di SETARA Institute. Pernah berkecimpung di dunia *commercial law* sebagai Junior Lawyer di SSAP Law Firm dan *corporate legal* di PT SCG Readymix Indonesia. Kemudian menjadi Tenaga Ahli Anggota Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan Negara sebelum akhirnya bergabung dengan INTEGRITY Law Firm.

Ketika mahasiswa merupakan aktivis dan organisatoris. Pernah menjabat sebagai Wakil Presiden BEM Ilmu Hukum UIN Jakarta dan Ketua *Moot Court Community* yang sempat membawa Hukum UIN Jakarta merajai kompetisi debat nasional dan juga memenangi berbagai kompetisi hukum nasional yakni Juara 2 Business Law Competition di Universitas Indonesia; Juara 1 Debat Hukum Nasional Padjajaran *Law Fair* di Universitas Padjajaran; Juara 1 Debat Antar Mahasiswa Nasional di Komisi Informasi Pusat RI; Juara 1 Debat Konstitusi Regional di Mahkamah Konstitusi RI; dan Juara 1 Debat Konstitusi Nasional di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.

Junior Lawyer di INTEGRITY *Law Firm*. Membidangi hukum tata negara dan hukum administrasi negara, meliputi perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, bergabung dalam tim penyusunan Keterangan Ahli dan Keterangan Pemerintah, menangani perkara *Judicial Review*, termasuk melakukan *review* kajian penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sebelum di INTEGRITY pernah menjadi Asisten Widyaiswara Madya pada Balai Diklat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk penyusunan Bahan Ajar dan Riset Peraturan Perundang-undangan di bidang sosial.



- Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.



Menyelesaikan studi S1 di International Program for Law and Sharia (IPOLS), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan konsentrasi Sosiologi Hukum dan HAM (2019). Sejak mahasiswa, telah menjadi Asisten Dosen dan Asisten Riset di 2 (dua) pusat studi, yaitu *International Centre of Law and Sharia Studies* (ICLASS) dan Pusat Studi Hukum dan Konstitusi, menghasilkan berbagai tulisan yang dimuat di kolom opini online maupun jurnal nasional dan internasional.

Menerima penghargaan sebagai Mahasiswa Berprestasi Utama 1 tingkat Provinsi Yogyakarta dari Kopertis V-Kemenristekdikti RI (2017). Pernah mengikuti *International Summer School* di Istanbul University, Turki (2016) dan International Islamic University Malaysia (2017). Mewakili Indonesia pada *ASEAN Youth Forum* di Manila, Filipina (2017) dan mendapatkan beasiswa penuh dari TEMASEK Foundation International untuk mengikuti program *Learning Express* (LeX) di Singapore Polytechnic (2018). Kemudian menjadi Staf Bidang Hukum di International Relations Office UMY (2019) yang bertanggung jawab untuk menyusun dokumen hukum terkait kerjasama internasional antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah luar negeri dengan UMY dan Muhammadiyah (2019).

- Anjas Rinaldi Siregar, S.H.

Mendapat gelar sarjana hukumnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021). Saat menjadi Mahasiswa, ia aktif di berbagai organisasi internal dan eksternal kampus. Tahun 2020 dipercaya sebagai Ketua Moot Court Community yang membawa UIN Jakarta mendapat banyak torehan prestasi di bidang debat hukum, karya tulis ilmiah dan peradilan semu. Ia sendiri berhasil menjuarai Kompetisi Peradilan Semu Pidana tingkat Nasional, Kompetisi Mediasi Nasional Piala Ketua Mahkamah Agung dan menjadi delegasi Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi (*student achievement award*).

Sejak bergabung dengan INTEGRITY ia telah terlibat dalam tim yang menangani perkara *Judicial Review Presidential Threshold*, gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OOD), maladministrasi korporasi, sengketa administrasi pertambangan/sawit, persekongkolan perusahaan swasta dalam penyerobotan lahan negara dan penanganan kasus kecurangan CPNS 2019.



GAMBARAN *RUNDOWN*

HARI	WAKTU	MATERI	PEMATERI
Hari ke I	08.00 – 09.00	Registrasi	Penyelenggara
	09.00 – 09.30	Pembukaan	Bappenas
	09.30 – 10.00	<i>Coffee Break</i>	Penyelenggara
	10.00 – 12.00	Konsep Dasar, Prinsip dan Asas Peraturan Perundang-undangan	Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
	12.00 – 13.00	ISHOMA	Penyelenggara
	13.00 – 15.00	Jenis, Hierarki, dan Materi Peraturan Perundang-undangan	Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

HARI	WAKTU	MATERI	PEMATERI
Hari ke II	08.30 – 10.30	Teknik Penyusunan Naskah Akademik	Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.
	10.30 – 11.00	<i>Coffee Break</i>	Penyelenggara
	11.00 – 12.30	Ragam Bahasa dan Teknik dan Analisis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si.
	12.30 – 13.30	ISHOMA	Penyelenggara
	13.30 – 15.00	Lanjutan Ragam Bahasa dan Teknik dan Analisis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si.

HARI	WAKTU	MATERI	PEMATERI
Hari ke III	08.30 – 10.00	Teknik dan Prosedur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Dr. Roberia, S.H., M.H.
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>	Penyelenggara
	10.30 – 12.00	Lanjutan Teknik dan Prosedur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Dr. Roberia, S.H., M.H.
	12.00 – 13.00	ISHOMA	Penyelenggara
	13.00 – 15.00	Studi Kasus Uji Peraturan Perundang-undangan	Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

HARI	WAKTU	MATERI	PEMATERI
Hari ke IV	08.30 – 10.30	Studi Kasus Perkara TUN	Muhammad Raziv Barokah, S.H., M.H.
	10.30 – 10.45	<i>Coffee Break</i>	Penyelenggara
	10.45 – 12.15	Praktik Analisa Regulasi yang Sedang disusun oleh Bappenas (IKN, Pembangunan Papua dll)	Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si.
	12.15 – 13.15	ISHOMA	Penyelenggara
	13.15 – 14.45	Lanjutan Praktik Analisa Regulasi yang Sedang disusun oleh Bappenas	Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si.
	14.45 – 15.00	<i>Coffee Break</i>	Penyelenggara
15.00 – 17.00	Memahami dan Menerapkan <i>Regulatory Impact Assessment</i> dan <i>Cost and Benefit Analysis</i>	Herlambang P. Wiratraman	

HARI	WAKTU	MATERI	PEMATERI
Hari ke V	08.30 – 10.30	Menghadirkan Hukum Progresif yang Berkeadilan	Herlambang P. Wiratraman
	10.30 – 10.45	<i>Coffee Break</i>	Penyelenggara
	10.45 – 12.45	Presentasi/Praktik	Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si.
	12.45 – 13.45	ISHOMA	Penyelenggara
	13.45 – 15.45	Evaluasi Hasil Praktik dan <i>Comprehensive Review</i>	Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si.
	15.45 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	Penyelenggara
	16.00 – 16.30	Penutupan	Penyelenggara

OPSI 3 HARI LEGAL DRAFTING

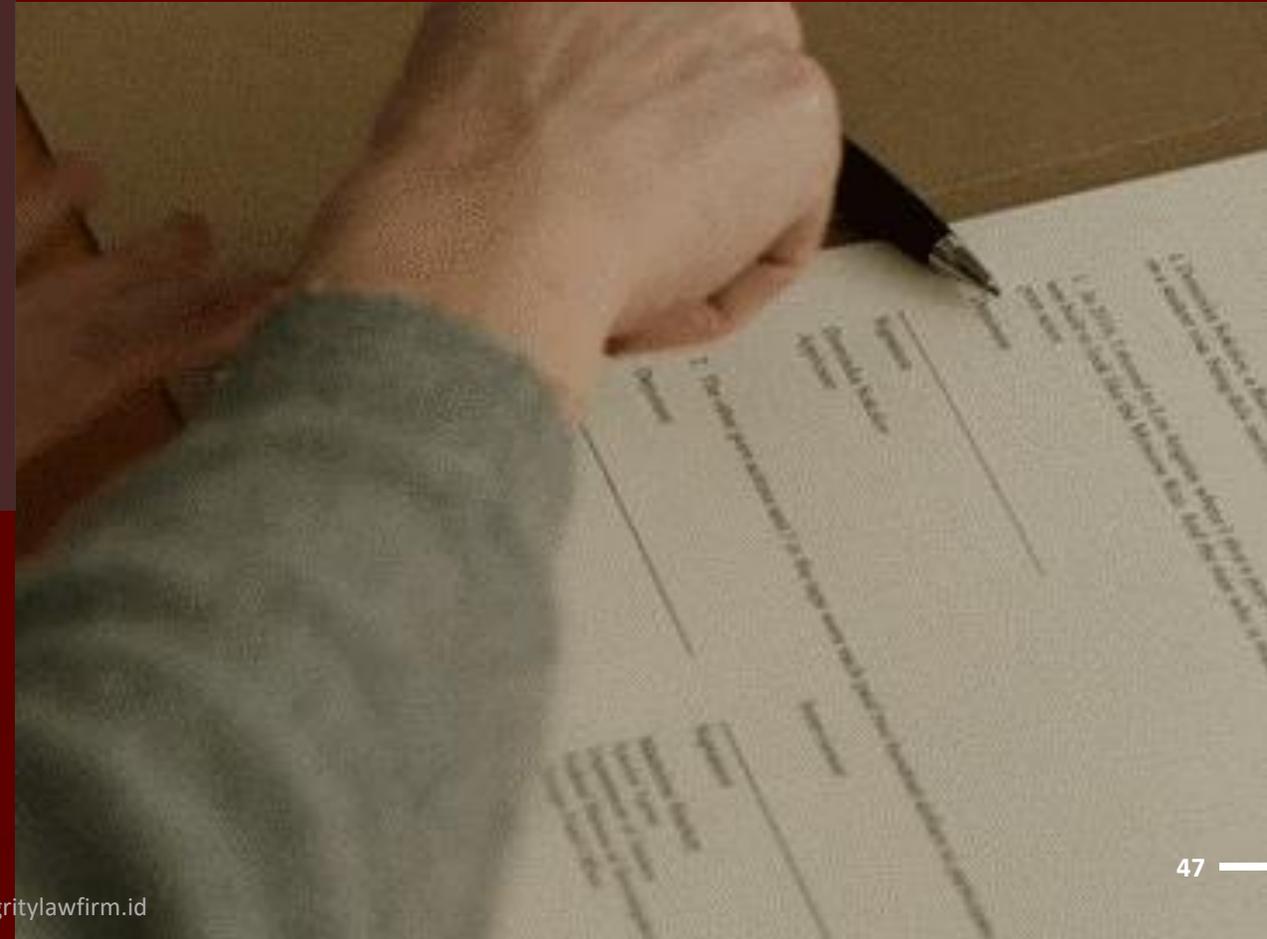
HARI	WAKTU	MATERI	PEMATERI
Hari ke I	08.00 – 09.00	Registrasi	Penyelenggara
	09.00 – 09.30	Pembukaan	Bappenas
	09.30 – 09.45	<i>Coffee Break</i>	Penyelenggara
	09.45 – 11.15	Konsep Dasar, Prinsip dan Asas Peraturan Perundang-undangan	Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
	11.15 – 12.30	ISHOMA	Penyelenggara
	12.30 – 14.00	Jenis, Hierarki, dan Materi Peraturan Perundang-undangan	Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
	14.00 – 14.15	<i>Coffee Break</i>	Penyelenggara
	14.15 – 16.15	Ragam Bahasa dan Teknik dan Analisis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si.

HARI	WAKTU	MATERI	PEMATERI
Hari ke II	08.30 – 10.00	Teknik Penyusunan Naskah Akademik	Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.
	10.00 – 10.15	<i>Coffee Break</i>	Penyelenggara
	10.15 – 11.45	Teknik dan Prosedur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Dr. Roberia, S.H., M.H.
	11.45 – 12.45	ISHOMA	Penyelenggara
	12.45 – 14.15	Studi Kasus Uji Peraturan Perundang-Undangan	Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
	14.15 – 14.30	<i>Coffee Break</i>	Penyelenggara
	14.30 – 15.30	Studi Kasus Perkara TUN	Muhammad Raziy Barokah, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	MATERI	PEMATERI
Hari ke III	08.30 – 10.00	Praktik Analisa Regulasi yang Sedang disusun oleh Bappenas (IKN, Pembangunan Papua dll)	Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si.
	10.00 – 10.15	<i>Coffee Break</i>	Penyelenggara
	10.15 – 11.45	Menghadirkan Hukum Progresif yang Berkeadilan	Herlambang P. Wiratraman
	11.45 – 12.45	ISHOMA	Penyelenggara
	12.45 – 14.15	Teknik Penyusunan Regulatory Impact Assessment dan Cost and Benefit Analysis	-
	14.15 – 14.30	<i>Coffee Break</i>	Penyelenggara
	14.30 – 16.00	Evaluasi Hasil Praktek dan Comprehensive Review	Penyelenggara
	16.00 – 16.30	Penutupan	

BIAYA PENYELENGGARAAN

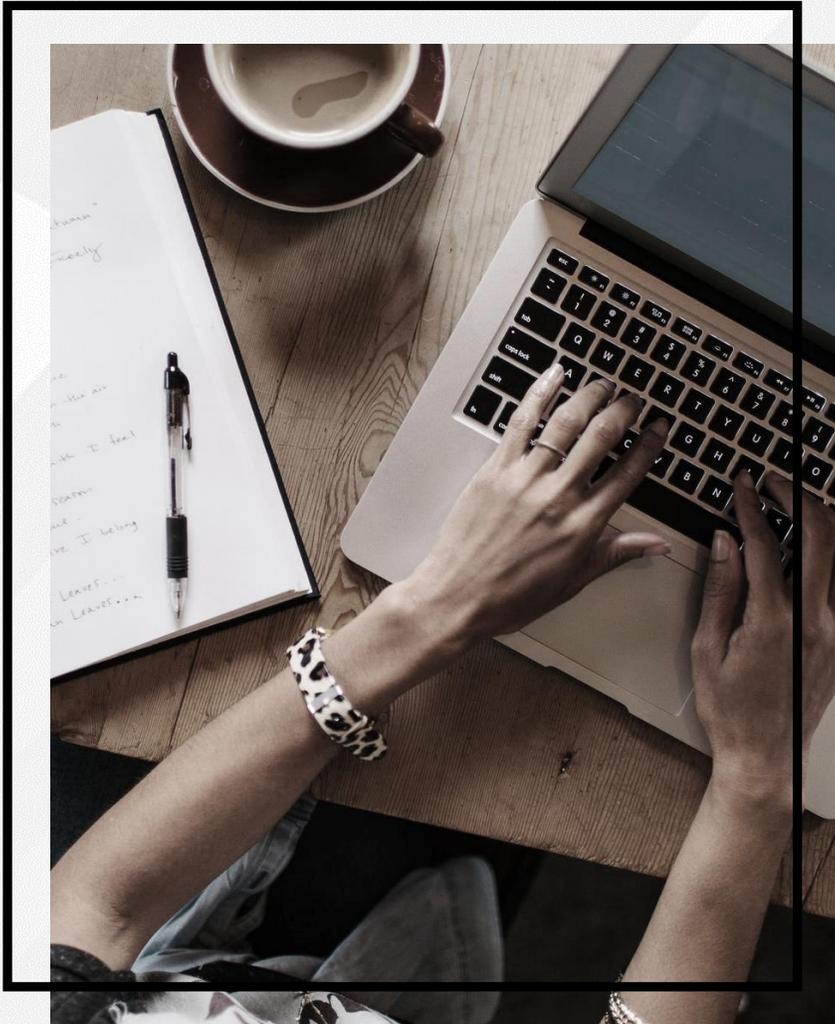
Biaya penyelenggaraan pelatihan disampaikan dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Proposal Pelatihan.



OUTPUT HANDBOOK

1. Modul Materi.

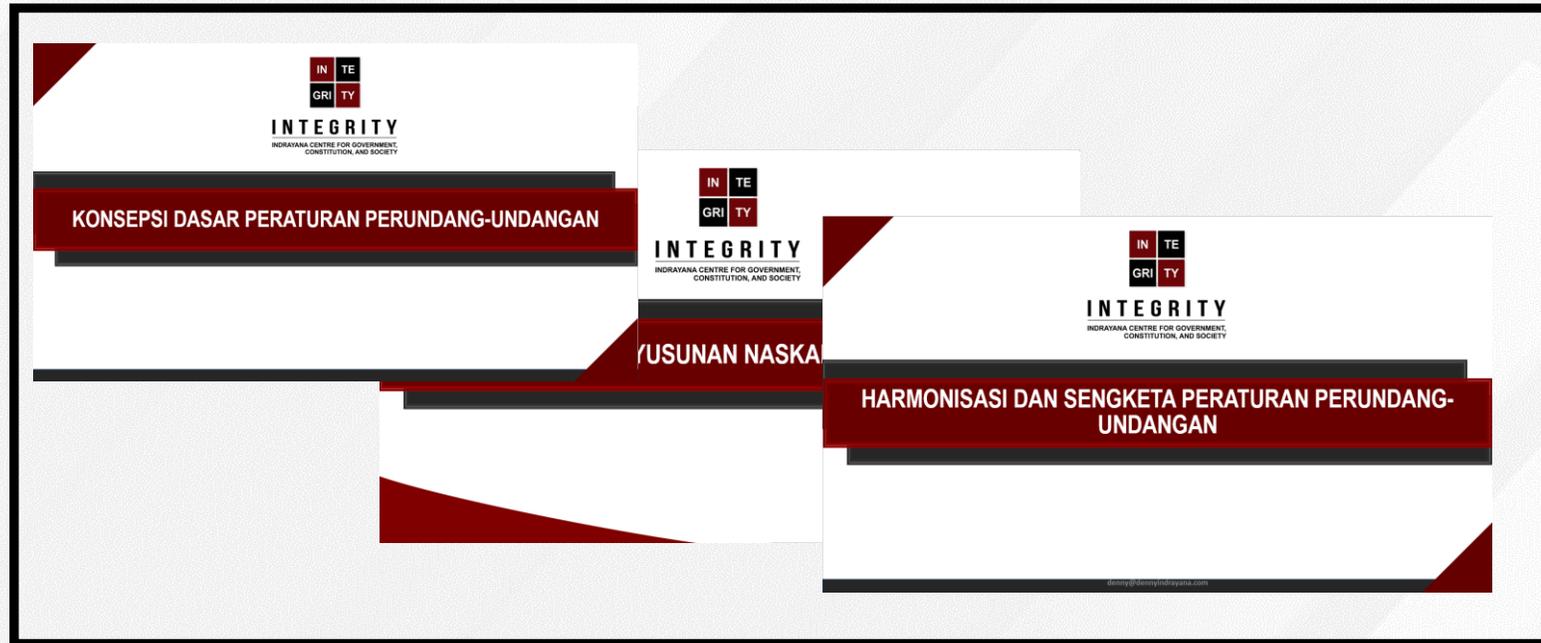
Modul yang terdiri dari 150-200 halaman, berisi *paper* mengenai seluruh materi yang dipaparkan dalam pelatihan.

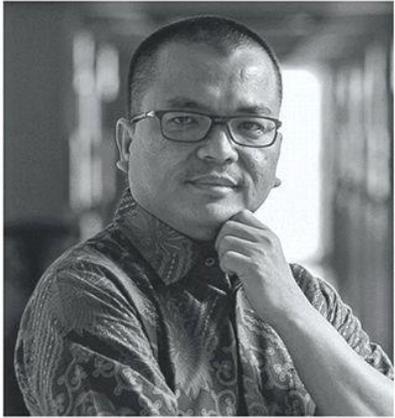


<p>INTEGRITY IN TE INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY</p> <p>MODUL PELATIHAN TEKNIS PENYUSUNAN REGULASI (LEGAL DRAFTING)</p> <hr/> <p>DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2019</p>	<p>INTEGRITY IN TE INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY</p> <p>MATERI 1 KONSEPSI DASAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <hr/> <p>PELATIHAN TEKNIS PENYUSUNAN REGULASI (LEGAL DRAFTING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2019</p>	<p>INTEGRITY IN TE INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY</p> <p>MATERI 5 RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <hr/> <p>PELATIHAN TEKNIS PENYUSUNAN REGULASI (LEGAL DRAFTING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2019</p>
--	---	---

2. Slide Presentasi.

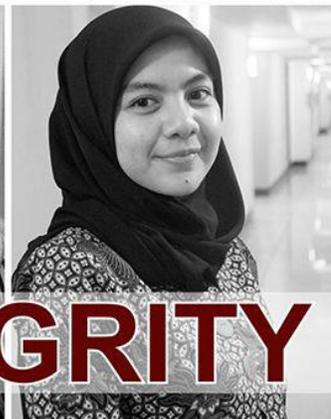
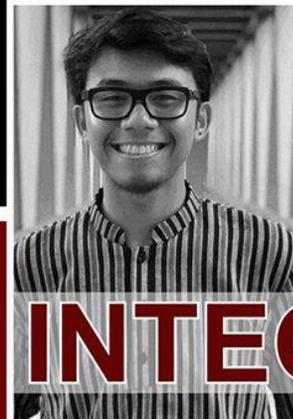
Slide dalam bentuk PDF yang ditampilkan oleh para narasumber dalam membawakan materi yang dipaparkan.





IN

TE

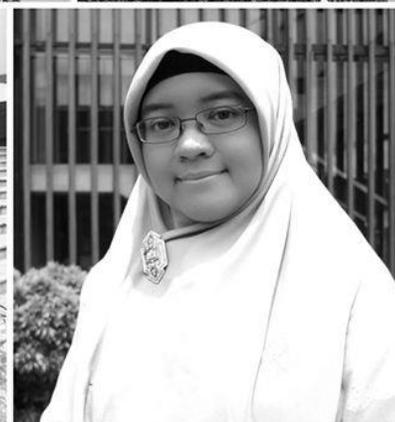


We are the

GRI

TY

INTEGRITY





<http://www.integritylawfirm.id>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

